

Submission	Review Process	Revised	Accepted	Published
10-12-2019	11-12 s/d 26-12-2019	25-12-2019	30-12-2019	25-01-2020

*Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 1 No. 1, Januari 2020 (38-48)*

Published by: Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

## **Politik Identitas Komunitas Bali di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin**

**Indah Sari**

Program Studi Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
*Indah05598@gmail.com*

**Endang Rochmiatun**

Program Studi Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
*endang\_dbj@yahoo.com*

### **Abstract**

This paper explains and depicts the Politics of Bali Community Identity in the Mukti Jaya Village, Muara Telang District, Banyuasin District. This type of research is a study using a fact-based field case study approach in the field. The focus of this study is to find out how the Balinese group can be accepted and mingled, and even the existence of other migrant populations is recognized without social and cultural discrimination. This research wanted to know what processes and actions carried out by the Balinese group in order to get recognition and get their rights to be equal with other residents, and how the approach of the Balinese group with the majority community so that they never experienced conflict can live side by side safely and peacefully.

In the village of Mukti Jaya, the Balinese group established very good relations with other migrants, the Balinese group upheld tolerance and help other fellow migrants. even the Balinese group was once the leader of a village head in the village of Mukti Jaya, with the holding of Balinese as the head of the Mukti Jaya Village the first milestone in getting permission to establish a place of worship in the village of Mukti Jaya. Balinese ethnic customs still flourish in the village of Mukti Jaya, and are still taught to the young generation of Balinese. for example Ogoh-ogoh celebrations, Ngaben ceremonies, and other Balinese arts.

**Keywords:** *balines ethnics, majority, minority, recognition.*

## **Abstrak**

Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan Politik Identitas Komunitas Bali di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan studi kasus lapangan berbasis fakta di lapangan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kelompok Bali dapat diterima dan bergaul, dan bahkan keberadaan populasi migran lainnya diakui tanpa diskriminasi sosial dan budaya. Penelitian ini ingin mengetahui proses dan tindakan apa yang dilakukan oleh kelompok Bali untuk mendapatkan pengakuan dan mendapatkan hak-hak mereka untuk setara dengan penduduk lainnya, dan bagaimana pendekatan kelompok Bali dengan mayoritas masyarakat sehingga mereka tidak pernah mengalami konflik . hidup berdampingan dengan aman dan damai.

Di desa Mukti Jaya, kelompok Bali menjalin hubungan yang sangat baik dengan migran lain, kelompok Bali menjunjung tinggi toleransi dan membantu sesama migran lainnya. bahkan kelompok Bali pernah menjadi pemimpin kepala desa di desa Mukti Jaya, dengan memegang orang Bali sebagai kepala Desa Mukti Jaya tonggak pertama dalam mendapatkan izin untuk mendirikan tempat ibadah di desa Mukti Jaya . Kebiasaan etnis Bali masih berkembang di desa Mukti Jaya, dan masih diajarkan kepada generasi muda Bali. misalnya perayaan Ogoh-ogoh, upacara Ngaben, dan seni Bali lainnya.

**Keywords:** *etnis bali, minoritas, mayoritas, pengakuan*

## **PENDAHULUAN**

Penelitian ini mengkaji tentang politik identitas kelompok Bali yang ada di Kabupaten Banyuasin yaitu di Desa Muktijaya Kecamatan Muara Telang yang dimana ada sekelompok pendatang yang memiliki jumlah yang lebih sedikit, dan memiliki budaya dan kepercayaan yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di Desa Muktijaya. Penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengetahui bagaimana kelompok Bali agar dapat diterima dan berbaur, bahkan diakui keberadaannya oleh masyarakat etnis lain yang ada di Desa Mukti Jaya. Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui proses dan tindakan apa saja yang dilakukan kelompok Bali agar mendapatkan pengakuan dan mendapatkan haknya agar sama dengan penduduk pendatang lainnya, dan bagaimana pendekatan yang dilakukan kelompok Bali dengan masyarakat mayoritas lainnya sehingga mereka tidak pernah mengalami konflik dan dapat hidup berdampingan dengan aman dan damai, dan bagaimana peran Negara dalam menghadapi kaum minoritas.

Lazimnya penduduk pendatang tidak mudah mendapatkan pengakuan dan penerimaan, akan tetapi pendatang khususnya etnis Bali dapat diterima dan mempunyai posisi penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Kelompok Bali menjalin hubungan yang cukup baik dengan pendatang lainnya, mereka tidak pernah mengalami konflik satu sama lain. Desa Muktijaya merupakan daerah transmigran yang dihuni oleh berbagai macam pendatang dari etnis dan agama yang berbeda seperti etnis Jawa, Bugis, Padang, Bali, Melayu dan penduduk asli Palembang.

Penduduk di Desa Muktijaya rata-rata bermata pencaharian sebagai petani, nelayan dan wirausaha. Penduduk Etnis Bali kebanyakan bercocok tanam padi di sawah dan berkebun kelapa dan tanaman sayur lainnya. Di Desa Muktijaya juga terdapat berabagai macam agama seperti Umat Islam, Kristen, Hindu. Dan sesama pendatang mereka dapat saling menerima dan berbaur dengan pendatang yang memiliki jumlah lebih sedikit, bahkan memiliki budaya dan kepercayaan yang berbeda.

Di Desa Muktijaya kelompok Bali menjalin hubungan yang sangat baik dengan pendatang lainnya, kelompok Bali menjunjung tinggi rasa toleransi dan tolong-menolong pada sesama pendatang lainnya. Bahkan kelompok Bali pernah menjadi pemimpin sebagai kepala Desa di Desa Muktijaya, dengan menjatannya kelompok Bali sebagai Kepala Desa di Muktijaya menjadikan tonggak awal mendapatkan izin pendirian tempat beribadah di Desa Muktijaya. Adat istiadat etnis Bali sampai kini masih tumbuh subur di Desa Muktijaya, dan masih diajarkan kepada generasi muda etnis Bali. Contohnya Hari Perayaan Nyepi, Pawai Ogoh-Ogoh, Upacara Ngaben, dan banyak lagi tarian khas Daerah Bali. Disini peneliti ingin mengetahui bagaimana kelompok Bali di Desa Muktijaya agar mendapatkan izin untuk mendirikan tempat beribada.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan suatu fenomena atau peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam perspektif penelitian. Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang di dapat langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara terhadap responden dan data sekunder yang didapat dari luar data yaitu sebagai penunjang dan pelengkap dari penelitian seperti dokumen dan arsip resmi. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh *Sugiono* yaitu analisis data terdiri dari 4 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, Reduksi data, penyajian data, manipulasi data, dan kesimpulan dan verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Politik Identitas**

Ada beberapa pemahaman yang muncul mengenai pemahaman tentang politik identitas sebagai sebuah teori dalam ilmu politik. Memaknai politik identitas harus diletakkan pada konsep identitas itu sendiri, yang oleh Suparlan, identitas atau jati diri adalah pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang dikaitkan diletakkannya rangkaian ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang menandai masuknya dalam satu kelompok atau golongan tertentu. Sementara Buchari mengutip Jumadi (2009) mengembangkan bahwa konsep identitas secara umum dapat dimaknai sebagai sebuah citra yang membedakan individu atau suatu kelompok dengan individu atau kelompok lain, hal tersebut dilakukan secara simultan

dalam interaksi sosial sampai memunculkan opini tertentu yang berkaitan dengan keberadaan individu atau kelompok tersebut. Secara tegas, Cressida Heyes dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy* mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Ketimbangan perorganisasian secara mandiri dalam ruang lingkup ideologi atau afiliasi kepartaian, politik identitas berkepentingan atas pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup institusi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Politik identitas seakan-akan meneguhkan adanya keutuhan yang bersifat esensial tentang keberadaan kelompok sosial tertentu berdasarkan identifikasi primordialitas.

Politik identitas di kalangan orang Bali (Hindu) bisa sangat mudah tampak pada strotip yang ditunjukkan dan menjadi asumsi umum misalnya kebiasaan orang Bali (Hindu) yang hidup berkelompok di wilayah tertentu, perayaan tradisi yang dilakukan secara bersamaan seperti Hari Raya Nyepi, Galungan namun demikian, Catells juga menegaskan bahwa “*Identities can also be originated from dominant institutions, they become identities only when and if social actors internalize them and construct their meaning around this internalization*” Catells mengemukakan bahwa identitas tidak hanya tentang bagaimana individu mengidentifikasi dirinya sendiri, tapi juga bagaimana kelompok dominan memberikan klaim dan menginternalisasi seseorang atau kelompok tertentu yang diletakkan pada ciri-ciri dan strotip yang diletakkan pada mereka. Dalam menentukan politik identitas, menurut Catells harus lebih dahulu dilakukan identifikasi bagaimana konstruksi sebuah identitas muncul yang menurutnya bisa dilihat dengan 3 model bentuk identitas, yaitu:

- a. *Legitimizing identity* atau legitimasi identitas, yaitu identitas yang dibangun oleh institusi (penguasa) yang dominan ada dalam kehidupan sosial. Institusi ini menunjukkan dominasinya dengan meletakkan sebuah identitas tertentu pada seseorang atau kelompok.
- b. *Resistance identity* atau resistensi identitas, yaitu identitas yang diletakkan oleh aktor sosial tertentu dimana pemberian identitas tersebut dilakukan dalam kondisi tertentu karena adanya dominasi hingga memunculkan satu resistensi dan bentuk identitas baru yang berbeda dari kebanyakan anggota komunitas sosial yang lain, konstruksi identitas inilah yang oleh Coulhoun dimaknai sebagai politik identitas.
- c. *Project identity* atau proyek identitas, konstruksi identitas pada model ini dilakukan oleh aktor sosial dari kelompok tertentu dengan tujuan membentuk identitas baru untuk bisa mencapai posisi tertentu dalam masyarakat, hal ini bisa terjadi sebagai implikasi dari gerakan sosial yang bisa merubah struktur sosial secara keseluruhan.

Merujuk pada beberapa pemahaman diatas, politik identitas berakar pada strotip yang dilekatkan dengan menggunakan perspektif primordialisme. Mengikuti konsep *polity* Aristoteles, Primordialisme berarti “berperang ke luar dan konsolidasi ke dalam”. Karena itu, politik identitas selalu ada dalam wilayah ketegangan antara superioritas dan inferioritas, antara mayoritas dan minoritas. Dalam wacana pluralism, ketika demokratisasi digulirkan dengan mendapatkan

dukungan kuat dari konsep multikulturalisme, politik identitas seolah menemukan kekuatannya, dimana keberadaan minoritas berubah dari didiamkan menjadi dipertanyakan sekaligus diperjuangkan baik dengan melakukan asimilasi maupun akulturasi yang bersifat sistemik. Perjuangan politik identitas akan menemukan muaranya saat stereotip yang diletakkan dapat disejajarkan dengan eksistensi kelompok dengan identitas lain dan mendapatkan hak-hak yang sama dalam lingkup sosial, budaya dan politik, hal tersebut bisa dilakukan dalam kultur demokrasi.

Dari beberapa pemahaman diatas, politik identitas dapat dipahami sebagai tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berdasarkan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan (Saber, 2019).

### **Politik Pengakuan**

Di dalam filsafat politik kontemporer, politik selalu didefinisikan setidaknya dengan dua kategori, yakni kategori redistribusi (*redistribution*), dan kategori pengakuan (*recognition*). Kategori redistribusi menurut Fraser, berarti setiap orang menginginkan distribusi kekayaan alam, dalam bentuk modal maupun sumber daya, secara adil dan merata. Sementara kategori pengakuan berarti, bahwa setiap orang ingin menciptakan masyarakat yang 'ramah terhadap perbedaan' (*difference friendly culture*). Artinya dengan kultur mayoritas untuk bisa mendapatkan pengakuan yang sepatutnya. Pihak-pihak yang menyetujui kategori redistribusi menginginkan pembagian kekayaan yang adil merata bagi seluruh pihak. Sementara pihak-pihak yang lebih menyetujui kategori pengakuan hendak memperjuangkan pengakuan bagi partikularitas etnis, ras, orientasi seksual, dan gender mereka. Dua kutub ini telah menjadi pusat perdebatan di dalam filsafat politik kontemporer.

Menurut Fraser perdebatan di antara dua kutub tersebut semakin meningkat intensitasnya. Dalam banyak kasus perjuangan untuk memperoleh pengakuan dari kultur minoritas seringkali terpisah sama sekali dari perjuangan untuk mewujudkan pembagian kekayaan yang merata. Fraser memberikan contoh tentang perjuangan feminisme. Bagi kaum feminis pembagian kekayaan yang adil dan merata justru semakin memperkuat dominasi kaum laki-laki di dalam ruang publik, yakni ketika bantuan dipandang sebagai sumbangan ataupun bantuan semata. Yang dibutuhkan kaum feminis adalah pengakuan akan perbedaan, dan bukan bantuan. Dalam konteks akademis para pemikir feminis, yang melihat gender sebagai suatu konstruk sosial, juga seringkali berdebat keras dengan para pemikir lain yang melihat gender sebagai suatu bentuk identitas ontologis yang bersifat statis. Perdebatan ini sebenarnya dapat dilihat sebagai gejala munculnya suatu gejala buruk, yakni terpisahnya politik kultural (*cultural politics*) dan politik praktis (*social politics*), dan terpisahnya politik perbedaan (*politics of difference*) dari politik kesetaraan (*politics of equality*).

Dalam merumuskan konsep Fraser hendak melepaskan dirinya dari pemahaman tradisional tentang identitas di dalam model politik pengakuan. Di titik ini politik pengakuan dipahami sebagai pengakuan terhadap identitas khusus kelompok partikular (*group specific cultural identity*). Politik pengakuan mengalami hambatan besar, ketika identitas kelompok partikular tersebut tidak lagi

diakui oleh kelompok yang dominan di dalam masyarakat. Akibatnya orang-orang yang berbeda di dalam kelompok partikular tersebut bisa mengalami krisis identitas. Disinilah perjuangan politik pengakuan, yakni perjuangan untuk menegaskan identitas kultural khusus orang-orang yang berbeda dari kultur mayoritas. Dengan demikian menurut Fraser dalam konteks penentuan identitas, politik pengakuan adalah politik identitas (*identity politics*). Akan tetapi ada masalah teoritis yang cukup pelik disini. Jika kita memahami identitas yang tidak diakui sebagai krisis identitas, maka bagi Fraser kita terlalu memberikan prioritas terhadap struktur psikis dari manusia dari pada konstruk sosial yang mendeterminasinya. Akibatnya kesadaran individu yang dipaksa dan dituntut untuk menyesuaikan dengan kultur kelompok. Kompleksitas identitas partikular yang merupakan fakta keras di dalam masyarakat majemuk, seperti seseorang bisa sekaligus orang Jawa, orang Islam, dan sekaligus bersekolah di sekolah Katolik pun hilang karena dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan salah satu kelompok di mana orang menyangkal, adanya identitas trans-kelompok, dan hanya mengakui identitas kelompok partikularnya semata. Secara umum menurutnya model berfikir semacam ini terlalu mudah jatuh ke dalam komunitarianisme represif.

Dalam konteks ini Fraser lalu menawarkan sebuah pemahaman baru tentang pengakuan (*recognition*). Ia pun mengartikan pengakuan sebagai persoalan yang bukanlah identitas kelompok khusus tetapi status anggota kelompok sebagai individu penuh di dalam interaksi sosial. Tidak adanya pengakuan dalam arti ini bukanlah hilangnya identitas kelompok, melainkan sebagai diskriminasi sosial yang membuat orang tidak dapat berpartisipasi di dalam kehidupan secara sosial secara maksimal. Politik pengakuan pun tidak bisa lagi dipahami sebagai politik identitas. Dengan model yang disebut Fraser sebagai model status (*status model*) ini politik pengakuan dapat diartikan sebagai suatu politik yang hendak melampaui semua bentuk diskriminasi dan subordinasi dengan mengakui semua orang, lepas dari apapun kelompoknya, sebagai bagian integral di dalam masyarakat, yang mampu berpartisipasi secara maksimal di dalam kehidupan sosial. Jika hal ini dapat diwujudkan, masyarakat dapat mencapai tahap pengakuan timbal balik dan kesetaraan status sosial secara memadai. Dan sebaliknya jika beberapa kelompok masyarakat mengalami diskriminasi dan subordinasi oleh kelompok-kelompok lainnya, sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi secara maksimal di dalam kehidupan sosial, maka keadaan ini, oleh Fraser, dapat disebut sebagai keadaan 'tidak adanya pengakuan' (*misrecognition*) dan subordinasi status (*status subordination*).

### **Jaringan Sosial Etnis Bali Dengan Etnis Bali Yang Berasal Dari Luar Desa Mukti Jaya**

Sebagai masyarakat minoritas yang ada di Desa Mukti Jaya, Etnis Bali tentunya menjalin komunikasi dan jaringan antar sesama Etnis Bali yang ada di Sumatera selatan ini. Kebanyakan dari Etnis Bali yang ada di Desa Mukti Jaya memiliki jaringan kekerabatan dengan Etnis Bali yang ada Di Tugu Mulyo. Tugu Mulyo merupakan lokasi yang banyak di huni Etnis Bali, oleh karena itu komunikasi dan jaringan yang terjalin antara Etnis Bali yang ada Di Desa Mukti Jaya dengan Etnis Bali luar masih sangat terjaga.

Dari segi jaringan perekonomian, Etnis Bali yang ada di Desa Mukti Jaya, memiliki kerja sama antara Etnis Bali yang Aada Di Tugu Mulyo, terkadang keluarga mereka yang ada di Tugu Mulyo meminjamkan modal untuk modal pertanian dan perkebunan, sehingga usaha mereka telah berhasil atas bantuan Etnis Bali yang Di Tugu Mulyo. Selain itu Etnis Bali yang ada di Desa Mukti jaya dengan Etnis bali yang di Tugu Mulyo mereka memiliki hubungan kekerabatan (keluarga), sehingga dalam pemberian modal untuk pertanian dan perkebunan yang diberikan bukan lain semata-mata untuk membantu perekonomian keluarga mereka yang kuraang mampu, sehingga memiliki perekonomian yang stabil.

Ketika perekonomian mereka telah berkecukupan, tak jarang dari mereka untuk pindah tempat tinggal ke Tugu Mulyo, dengan alasan ingin berkumpul dengan keluarga yang ada disana. Bisa dikatakan bahwa di Desa Mukti Jaya hanya menjadi lahan untuk mata pencaharian mereka.

### **Jaringan Sosial Etnis Bali dengan Etnis Bali Sesama Di Desa Mukti Jaya**

Dengan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan antar sesama masyarakat Etnis Bali, yang memiliki budaya dan kepercayaan yang sama, mereka saling tolong-menolong dan telah merasa menjadi satu keluarga, meski taka da hubungan darah. Tidak pernah terjadi selisih paham antar sesame Etnis Bali yang tinggal di Desa Mukti Jaya.

Ketika ada salah satu dari mereka yang mengalami musibah, mereka selalu bersimpatikan dan menggerakkan karang taruna pemuda Bali untuk membantu meringankan beban keluarga yang terkena musibah. Dalam segi ekonomi, Etnis Bali yang memiliki perekonimian yang berkecukupan akan membantu etnis Bali yang tidak memiliki lahan untuk pertanian dan perkebunan dengan cara menyewakan tanah yang dimiliki dan meminjamkan modal untuk membeli bibit dan peralatan lainnya untuk pertanian, yang nantinya akan dibayar setelah panen tiba.

Interaksi antara etnis Bali antara masyarakat yang ada di Desa Mukti Jaya terjalin komunikasi yang sangat baik, mereka tidak pernah mengalami suatu konflik atau suatu gesekan sesame masyarakat Desa Mukti Jaya. Pembagian perekonomian dan penghasilan tergantung dengan skill yang dimiliki masing-masing masyarakatan tanpa ada pembatas dan sekat-sekat antar etnis.

Kehidupan masyarakat yang bisa dikatakan berkecukupan biasa membuka jenis usaha apa saja tanpa ada rasa takut mengganggu masyarakat lain yang memiliki usaha yang sama. Masyarakat yang memiliki usaha yang cukup besar, juga membuka peluang pekerjaan bagi yang membutuhkan tanpa memandang jenis etnis dan suku bahkan agama yang membutuhkan pekerjaan, karena rasa tolong-menolong dan toleransi yang diterapkan di Desa Mukti Jaya tumbuh subur.

Interaksi antar kelompok etnis Bali dan masyarakat Desa Mukti Jaya terjalin sangat harmonis, terlihat dalam hal gotong royong saat perbaikan jalan ketika jalan di Desa Mukti Jaya rusak dilanda hujan yang lebat, pawai ogoh-ogoh yang dibantu pemuda Desa Mukti Jaya saat Etnis Bali selesai menjalankan Ibadah Nyepi.

## **Tindakan Yang Dilakukan Etnis Bali Dalam Mendapatkan Pengakuan Dari Masyarakat Mayoritas Etnis Jawa**

Memaknai politik identitas, identitas atau jati diri adalah pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang dikaitkan rangkaian ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang menandai masuknya dalam satu kelompok atau golongan. Politik identitas dikalangan Etnis Bali bisa sangat mudah tampak pada stereotip yang ditunjukkan dan menjadi asumsi umum misalnya kebiasaan Etnis Bali yang hidup berkelompok di wilayah tertentu, perayaan tradisi yang dilakukan secara bersamaan seperti Hari Raya Nyepi, Galungan dan Perayaan lainnya.

Dengan mayoritas untuk bisa mendapatkan pengakuan yang sepatutnya, kategori redistribusi menginginkan pembagian kekayaan yang adil merata bagi seluruh pihak. Pengakuan yang dapat diartikan sebagai suatu politik yang hendak melampaui semua bentuk diskriminasi dan subordinasi dengan mengakui semua orang, lepas dari apapun kelompoknya, sebagai bagian integral di dalam masyarakat, yang mampu berpartisipasi secara maksimal di dalam kehidupan sosial.

Etnis Bali dalam memahami pengakuan sebagai kesetaraan status sosial. Dari awal mula kedatangan Etnis Bali di Desa Mukti Jaya sebagai masyarakat transmigran yang membawa sosial, budaya, dan kepercayaan yang berbeda, tentunya mendapatkan sorotan dari masyarakat transmigran lainnya yang memiliki jumlah yang jauh lebih banyak dari Etnis Bali. Dengan memiliki jumlah yang bisa dikatakan masyarakat minoritas, Etnis Bali untuk melaksanakan kebudayaan dan kepercayaan yang berbeda dengan masyarakat mayoritas tentunya tidak sebebaskan dengan masyarakat mayoritas.

Dalam memperjuangkan kesetaraan dalam hal sosial budaya dan kepercayaan, Etnis Bali dengan cara perlahan mereka membentuk organisasi pemuda-pemudi Bali, yang bertujuan untuk melestarikan kesenian Etnis Bali, dengan cara memperkenalkan kesenian-kesenian Bali. Seiring berjalannya waktu kesenian Bali mulai diperkenalkan dengan cara menampilkan kesenian Bali disetiap acara pernikahan Etnis Bali yang dihadiri para masyarakat Desa Mukti Jaya. Dengan begitu perlahan kesenian Bali mulai dikenal di kalangan masyarakat mayoritas.

Dalam hal beribadah, Etnis Bali mendapatkan izin mendirikan tempat beribadah oleh pemerintah Desa, karena pemerintah desa memahami multikulturalisme yang ada di Desa Mukti Jaya. Maka dari itu tidak ada larangan dari pihak Desa untuk melarang mendirikan tempat beribadah untuk Etnis Bali, bahkan Etnis Bali mendapatkan bantuan materil dari masyarakat setempat dan dari pihak desa. Hingga kini tempat beribadah atau Pure Etnis Bali yang ada di Desa Mukti Jaya ada disetiap rumah dan ada juga Pure Agung yang berada di tengah-tengah masyarakat Etnis Bali sejumlah 2 Pure.



Dalam membangun Desa Mukti Jaya, Etnis Bali juga ikut berpartisipasi dan menjadi perangkat Desa, dan menajabat sebagai Sekretaris Desa Mukti Jaya. Masyarakat mayoritas tidak membedakan antara masyarakat minoritas yang bisa mendapatkan haknya untuk membangun Desa Mukti Jaya.

Sebagian besar masyarakat minoritas di Indonesia mendapatkan pengakuan keberadaannya dan kebebasan dalam berpolitik memiliki hak-hak warga formal. Akan tetapi politik pengakuan dan status legal mempresentasikan sebuah perjuangan untuk proses inklusi dalam masyarakat secara formal dan informal. Yang terkait dalam inklusi ini adalah politik hak dan partisipasi yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Masyarakat minoritas yang ada di Desa Mukti Jaya mendapatkan pengakuan dan keberadaannya sangat dihargai, sehingga mereka memiliki politik hak dan partisipasi yang sama dengan masyarakat mayoritas lainnya (Yahya, 2019).

Dengan demikian perjuangan Etnis Bali untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sama baik dalam bidang sosial budaya dan politik telah mereka dapatkan, kini mereka bisa hidup berdampingan dengan menjunjung tinggi rasa toleransi dan raso simpatik antara sesama masyarakat lainnya. Etnis Bali di Desa Mukti Jaya mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum dan pemerintahan Desa tanpa adanya pembedaan ras, suku, budaya dan agama.

## **KESIMPULAN**

Keberadaan Etnis Bali di tengah-tengan mayoritas masyarakatnya adalah Etnis Jawa sebuah mulikuturalsme yang harus saling menghormati da saling tolong menolong. Tetapi, tak jarang biasanya jika sebuah minoritas yang berada di dalam mayoritas selalu mengalami konflik antar Etnis, tetapi lain dengan kejadian yang terjadi Etnis Bali yang ada di Desa Mukti Jaya menjali hubungan dengan mayoritas begitu tentram dan tidak pernah mengalami konflik antar Etnis.

Hubungan kekerabatan yang terjalin di antar Etnis sangatlah baik, dengan menjunjung tinggi rasa toleransi antar masyarakat, sehingga tercipta kondisi yang tidak pernah terjadi konflik. Dalam bentuk pengakuan yang didapatkan Etnis Bali dari masyarakat mayotiras yaitu:

1. Mendapatkan hak politik yang sama dengan msyarakat mayoritas lainnya, seperti Etnis Bali bebas menyalonkan diri menjadi calon kepala desa di Desa Mukti Jaya, dan Kini menjabat sebagai sekretaris desa. Selama 4 kali pemilihan kepala Desa Mukti Jaya Etnis Bali memang tidak pernah mencalonkan dirinya menjadi calon kepala desa, namun dalam perangkat desa, Etnis Bali selalu mendapatk jabatan di Desa Mukti Jaya, Bahkan menjadi pegawai di Kecamatan Muara Telang. Pada pemerintahan Bapak Simon, Etnis Bali mendapatka posisi sebagai sekretaris Desa Mukti Jaya yang menjabat saat ini adalah Bapak I Made Sudarsana. Dengan demikian hak politik yang sama di rasakan Etnis Bali tanpa ada deskriminasi jabatan di pemerintahan Desa.

2. Memiliki keleluasaan dalam menampilkan kesenian disetiap perayaan desa atau ulang tahun Desa Mukti Jaya, bahkan selalu mendapatkan kesempatan menampilkan kesenian di Kecamatan Muara Telang ketika diadakan acara di kecamatan. Dalam rangka perayaan ulang tahun Kecamatan Muara Telang, Etnis Bali selalu mendapatkan kesempatan untuk menampilkan kesenian tari yang di miliki oleh Etnis Bali, mereka selalu memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepada mereka, karena kesempatan itu adalah sebagai salah satu bentuk pengakuan keberadaan mereka sebagai warga Kecamatan Muara Telang, dan juga sebagai kesempatan untuk memperkenalkan kesenian mereka kepada masyarakat luas yang merupakan tamu yang menghadiri acara tersebut yang biasanya juga tamu berasal dari luar kecamatan dan bahkan tamu dari Kabupaten Banyuasin.
3. Kebebasan mendirikan tempat beribadah dan menjalankan hari raya yang dilakukan secara pawai di Desa Mukti jaya, kebebasan mendirikan tempat beribadah yang biasanya ada di setiap rumah Etnis Bali da nada satu Pure yang menjadi tempat melakukan ibadah bersama-sama, dan menjadi tempat beribadah saat perayaan hari raya besar yang diperingati oleh Etnis Bali. Pendirian tempat beribadah yang tidak terjadi pro atau kontrak antara pemerintahan desan dan masyarakat yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan Etnis Bali, bahkan mereka saling tolong-menolong mendirikan Pure meski berbeda tempat beribadah. Dalam hal melakukan pawai ogoh-ogoh yang dilakukan Etnis Bali pada malam hari tidak sedikitpun mendapatkan celaan dari masyarakat yang mayoritas Etnis Jawa dan memiliki kepercayaan yang berbeda, justru ikut dalam meramaikan pawai ogoh-ogoh yang dilakukan Etnis Bali agar terlihat meriah, biasanya penonton yang mayoritasnya adalah diluar Etnis Bali yang memiliki antusias yang sangat tinggi.
4. Memiliki perekonomian yang setara dengan masyarakat mayoritas tanpa adanya perbedaan Etnis. Etnis Bali memiliki perekonomian yang setara dengan masyarakat umumnya, mereka memiliki penghasilan yang sama yaitu sebagai petani dan pekebun, bahkan ada yang menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Karena memiliki perekonomian yang sama dengan masyarakat mayoritas, mereka juga mendapatkan pendidikan yang sama dengan masyarakat lainnya.
5. Dapat menikahkan anaknya dengan Etnis lainnya, tanpa adanya diskriminasi terhadap budaya dan keyakinan yang berbeda.
6. Dapat hidup nyaman dan tentram tanpa dihantui rasa takut akan adanya konflik, karena adanya program Pemerintah Desa, yaitu pertemuan setiap bulan antar setiap pemuka agama dan pemuka adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Lukman. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Astita, I Nyoman Wayan Griya DKK. 2015. *Peta Kesenian dan Kebudayaan Bali: Seni Pertunjukan Modal Dasar Pesta Kesenian Bali Dan Pemabangunan Bali Berkelanjutan*, Deva Communicatons, Denpasar.
- Hiariej, Eric dan Stokke, Kristian. 2018. *Politik Kewargaan Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nasution, N. (2017). Ulama dan Politik: Keterlibatan Ulama Sumatera Selatan dalam Politik Praktis dan Community Empowerment Pada Abad XX. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 1(2), 126-144. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v1i2.4038>
- Saberi, R. (2019). Ethnic Enclosure in Multicultural Muslim Community Life: Case Study in Golestan Province, I.R. Iran. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(2), 84-96. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i2.4333>
- Sudarsama, Putu, *Ajaran Agama Hindu (Acara Agama)*, Yayasan Dharma Acarya, 2003-2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Suharsimi, Arikunto. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Renika Cipta, Jakarta
- Syukri, A. (&nbsp;). Malay Muslims Patani Insurgency Pattern in the Post-Revolution 1932. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(2), 146-155. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i2.4400>
- Yahya, A. (2019). Political Communication of Hasan Basri Agus; Dramaturgical Analysis in Jambi Local Government Implementation. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(2), 156-165. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i2.4401>